MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

Nurafryanti, Bagas Brian Pratama
S1 Akuntansi, Universitas Terbuka
Email Korespondensi: yantiokedeh@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of transparency and accountability on the effectiveness of financial governance at the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) of Bima City. A quantitative approach was employed to examine the relationship between transparency, accountability, and public financial governance. The results indicate that transparency and accountability each have a positive and significant partial effect on public financial governance. Simultaneously, both variables also exert a significant influence, as evidenced by an F-value of 48.276 and a significance level of 0.000. The coefficient of determination (0.584) reveals that transparency and accountability explain 58.4 percent of the variation in public financial governance, while the remaining 41.6 percent is influenced by factors outside the research model. These findings underscore that financial information transparency, clear responsibilities, internal controls, reporting quality, and follow-up on audit findings are crucial elements in achieving financial management that is effective, efficient, compliant, and oriented toward quality public service. Therefore, the Bima City DPMPTSP needs to strengthen the digitalization of financial information, enhance staff competence, refine accountability mechanisms, and conduct continuous evaluations of financial governance.

***Keywords**: Transparency, accountability, public financial governance, public service.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas tata kelola keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan transparansi dan akuntabilitas dengan tata kelola keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan publik. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan, ditunjukkan oleh nilai F sebesar 48,276 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,584 menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mampu menjelaskan 58,4 persen variasi tata kelola keuangan publik, sedangkan 41,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan, kejelasan tanggung jawab, pengendalian internal, kualitas pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan unsur penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, patuh, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Bima perlu memperkuat digitalisasi informasi keuangan, meningkatkan kompetensi aparatur, menyempurnakan mekanisme pertanggungjawaban, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, tata kelola keuangan publik, pelayanan publik.

Article history
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism checker no 80
Copyright: author
Publish by: musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan sektor publik yang kredibel menjadi prasyarat mutlak dalam menjamin optimalisasi pelayanan perizinan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, keuangan publik tidak semata-mata berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengubah sumber daya publik menjadi manfaat nyata bagi warga(Alif et al., 2025). Setiap rupiah yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan perizinan harus dikelola berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan, serta orientasi pada kepentingan Masyarakat (Ulin & Aisyah, 2023). Oleh karena itu, kualitas tata kelola keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima memiliki arti strategis, karena instansi tersebut berperan sebagai salah satu pintu utama interaksi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi perizinan. Pelayanan yang cepat, pasti, mudah diakses, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, ketepatan penganggaran, pengendalian internal, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik.

Desentralisasi memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan dan mengelola sumber daya sesuai karakteristik wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut sekaligus menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Perubahan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel melalui penyajian laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan, belanja, arus kas, dan posisi keuangan daerah (Fatoni, 2020).

Dalam pelaksanaannya, tuntutan tersebut perlu diterjemahkan ke tingkat organisasi perangkat daerah, termasuk DPMPTSP, melalui perencanaan anggaran yang selaras dengan target pelayanan, pelaksanaan kegiatan yang terukur, dokumentasi transaksi yang memadai, dan pelaporan yang dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, benar, tepat waktu, dan mudah dipahami mengenai proses maupun hasil pengelolaan keuangan. Transparansi tidak cukup diwujudkan melalui publikasi dokumen anggaran secara formal, tetapi harus memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui sumber pendanaan, prioritas belanja, realisasi program, capaian kegiatan, serta alasan atas perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Dalam pelayanan perizinan, transparansi juga berkaitan dengan kejelasan persyaratan, prosedur, jangka waktu, biaya, mekanisme pengaduan, dan standar pelayanan.

Keterbukaan informasi keuangan dan pelayanan dapat memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai pengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik mandat public (Ulin & Aisyah, 2023). Selain itu, transparansi dapat memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan pengawasan sosial, dan membangun kepercayaan terhadap organisasi pemerintah. Kajian mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa informasi fiskal perlu disampaikan dalam bentuk yang terbuka, relevan, dan mudah dipahami agar transparansi tidak hanya bersifat simbolik (Fatoni, 2020). Dengan demikian, transparansi pada DPMPTSP perlu dilihat sebagai instrumen untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan bukan sekadar sebagai kewajiban pelaporan. Sementara itu, akuntabilitas mengandung tuntutan agar setiap keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil pelaksanaan program dapat dijelaskan,

dipertanggungjawabkan, serta dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan tujuan organisasi. Akuntabilitas mencakup dimensi keuangan, administratif, kinerja, dan etika. Pada dimensi keuangan, akuntabilitas mengharuskan adanya pencatatan yang tertib, pelaporan yang dapat diverifikasi, pengendalian terhadap risiko penyimpangan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan(Chakim et al., 2024).

Pada dimensi kinerja, akuntabilitas menilai apakah anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran dan manfaat sesuai target, misalnya peningkatan kecepatan layanan, pengurangan antrean, perluasan akses informasi, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Penelitian mengenai pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa akuntabilitas politik dan kelembagaan dapat mengurangi kesenjangan informasi, membatasi perilaku oportunistik, dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik (Eckardt, 2008). Temuan lain memperlihatkan bahwa pengendalian internal yang efektif dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dapat mengurangi kecenderungan kecurangan laporan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Sianturi & Siahaan, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang saling melengkapi: transparansi menyediakan informasi yang memungkinkan pengawasan, sedangkan akuntabilitas memastikan adanya kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan berdasarkan informasi tersebut. Pentingnya kedua prinsip tersebut semakin terlihat dalam pengelolaan belanja daerah. Besarnya anggaran belum tentu berbanding lurus dengan kualitas layanan apabila alokasi dan realisasinya tidak diarahkan pada kebutuhan prioritas. Studi mengenai belanja pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa pengeluaran daerah dapat meningkatkan akses layanan publik, tetapi dampaknya tidak selalu linear; pengelolaan yang kurang baik dapat menyebabkan tambahan sumber daya justru menghasilkan manfaat yang menurun, sedangkan belanja pada daerah dengan tata kelola dan hasil audit yang lebih baik memberikan dampak yang lebih konsisten terhadap pelayanan (Lewis, 2016). Oleh sebab itu, efektivitas harus dimaknai sebagai tingkat ketercapaian tujuan anggaran dan program, sedangkan efisiensi berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keluaran terbaik melalui penggunaan sumber daya yang wajar. Efektivitas dan efisiensi tidak boleh dipisahkan dari kepatuhan, karena penghematan biaya yang mengabaikan prosedur hukum, standar akuntansi, atau kualitas layanan bukanlah bentuk efisiensi publik yang sesungguhnya. Dalam organisasi sektor publik, penerapan prinsip tersebut memerlukan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, pelaporan, serta evaluasi. Kualitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi keuangan, dan efektivitas pengawasan internal maupun eksternal merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan tata kelola keuangan (Maulana, 2026).

Pada DPMPTSP Kota Bima, penerapan tata kelola keuangan perlu ditempatkan dalam karakteristik organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Setiap kelemahan dalam pengelolaan anggaran berpotensi memengaruhi ketersediaan sarana layanan, kompetensi petugas, pemeliharaan sistem digital, penyebaran informasi, dan kecepatan penyelesaian dokumen perizinan. Sebaliknya, anggaran yang direncanakan dan dipertanggungjawabkan secara baik dapat memperkuat kapasitas pelayanan, meningkatkan kepastian prosedur, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif. Meskipun demikian, persoalan tata kelola tidak dapat diasumsikan hanya berasal dari keterbatasan anggaran. Masalah dapat pula muncul dalam bentuk keterlambatan penyampaian informasi, rendahnya keterbacaan dokumen keuangan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan, lemahnya pengukuran manfaat program, pengawasan yang belum optimal, atau tindak lanjut pemeriksaan yang belum konsisten. Literatur tentang pengelolaan keuangan daerah juga mengingatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dapat menjadi bersifat administratif apabila tidak disertai pemahaman manajerial, sementara transparansi anggaran

dapat kehilangan makna apabila informasi hanya dipublikasikan tanpa memperhatikan aksesibilitas dan keterpahaman masyarakat (Mahruzal et al., 2025).

Permasalahan tersebut penting dikaji dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima karena karakter layanan perizinan menuntut hubungan yang intensif, cepat, dan terukur antara pemerintah dengan pengguna layanan. Penilaian terhadap tata kelola keuangan tidak hanya diperlukan untuk mengetahui apakah organisasi telah mematuhi aturan, tetapi juga untuk menguji apakah transparansi dan akuntabilitas benar-benar berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik dan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai hubungan antara prinsip good governance dan pengelolaan keuangan pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam memperbaiki mekanisme penyediaan informasi, memperjelas pembagian tanggung jawab, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas pelaporan, serta menyusun anggaran yang lebih berorientasi pada hasil pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima, menganalisis penerapan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas baik secara parsial maupun simultan terhadap tata kelola keuangan publik, serta merumuskan implikasi kebijakan bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan kualitas pelayanan perizinan. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini menempatkan tata kelola keuangan sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga pada penciptaan nilai publik melalui pengelolaan sumber daya yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Tata Kelola Keuangan Sektor Publik

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berlandaskan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Regulasi ini menjadi acuan bagi perangkat daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kualitas tata kelola keuangan daerah dapat ditinjau melalui kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan yang mencerminkan ketepatan pengelolaan sumber daya publik. Masnila et al. (2022) mengkaji kualitas pelaporan keuangan serta dampak penerapan good government governance pada pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu, Saleh et al. (2021) menguji pengaruh tata kelola yang baik terhadap kinerja keuangan dengan mempertimbangkan konteks budaya siri' di Sulawesi Selatan. Kedua penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami pentingnya tata kelola dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam konteks

DPMPTSP, penerapan prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan regulasi, transparansi anggaran, akuntabilitas pelaporan, serta efektivitas penggunaan sumber daya guna mendukung pelayanan perizinan yang berkualitas.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Transparansi merupakan prinsip tata kelola organisasi sektor publik yang menekankan keterbukaan informasi keuangan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Prinsip ini memungkinkan masyarakat dan pihak terkait memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar pengawasan serta evaluasi kinerja organisasi. Abed et al. (2022) mengintegrasikan transparansi dan pengungkapan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi akuntansi kreatif dan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam membatasi peluang manipulasi serta meningkatkan kredibilitas informasi keuangan.

Sementara itu, Sofyani et al. (2020) meneliti pemerintah daerah di Indonesia dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan sebagai capaian yang dipengaruhi oleh tata kelola teknologi informasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya ditentukan oleh komitmen organisasi, tetapi juga oleh ketersediaan sistem informasi yang memadai untuk mendukung penyediaan dan penyebaran informasi secara efektif. Dalam konteks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), transparansi memiliki dua dimensi utama, yaitu keterbukaan penggunaan anggaran instansi dan keterbukaan informasi pelayanan perizinan. Dimensi kedua mencakup kejelasan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian layanan. Penerapan transparansi pada kedua dimensi tersebut dapat memperkuat pengawasan publik, mengurangi ketidakpastian pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi sektor publik yang menegaskan kewajiban pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dan masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan administratif dan keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap peraturan, keterbukaan informasi, pencapaian target kinerja, serta tanggung jawab atas hasil kebijakan. Dengan demikian, akuntabilitas memastikan bahwa anggaran, aset, dan sumber daya manusia dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tran et al. (2021) menunjukkan, berdasarkan bukti empiris dari Vietnam, bahwa akuntabilitas berperan dalam hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan kinerja organisasi sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tidak cukup hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai dasar pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang efektif, informasi keuangan dapat membantu organisasi mengidentifikasi penyimpangan, mengevaluasi penggunaan anggaran, dan merumuskan tindakan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Sofyani et al. (2020) menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu dimensi tata kelola pemerintah daerah yang dapat diperkuat melalui dukungan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi mendukung pencatatan, pengolahan, dan penyampaian informasi keuangan secara sistematis, cepat, dan terintegrasi. Selain itu, sistem informasi dapat meningkatkan keterlacakan penggunaan anggaran, transparansi pelaksanaan program, dan efektivitas pengawasan internal. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kompetensi aparatur, kualitas data, komitmen pimpinan, serta konsistensi pengawasan. Oleh

karena itu, akuntabilitas menjadi landasan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui desain penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal serta pengaruh antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas, sedangkan variabel dependennya adalah tata kelola keuangan publik. Pemilihan desain tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner yang validitas dan reliabilitas diadaptasi dari Sari et al. (2020), Poluakan et al. (2024) dan Zubaidah & Nugraeni (2023) ketiganya paling relevan dengan konstruk transparansi–akuntabilitas–pengelolaan keuangan pemerintah, serta sama-sama menggunakan responden dari lingkungan pemerintahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan koefisien determinasi untuk menganalisis pengaruh transparansi serta akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan publik (Risya & Nurodin, 2017; Wonar et al., 2024). Penelitian dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dengan unit analisis berupa aparatur yang terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai DPMPTSP Kota Bima sebanyak 72 orang pegawai, dengan demikian maka dengan menggunakan teknik sampling jenuh semua anggota populasi sebagai responden penelitian. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert lima (Sofyani et al., 2022). Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban pada setiap variabel, sedangkan analisis inferensial dilakukan melalui regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kedua variabel secara parsial dan simultan, dan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi variasi tata kelola keuangan publik yang dapat dijelaskan oleh transparansi dan akuntabilitas (Wonar et al., 2024). Untuk melengkapi hasil kuantitatif, informasi dari dokumen keuangan digunakan sebagai bahan verifikasi terhadap jawaban responden, sehingga kesimpulan penelitian tidak hanya didasarkan pada persepsi aparatur, tetapi juga mempertimbangkan bukti administratif dan praktik pengelolaan keuangan yang berlangsung di DPMPTSP Kota Bima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian berdasarkan jawaban responden, tanpa melakukan pengujian hubungan atau pengaruh antarvariabel. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan tata kelola keuangan publik (Y) pada DPMPTSP Kota Bima. Analisis dilakukan dengan melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata digunakan untuk mengetahui kecenderungan penilaian responden, sedangkan standar deviasi menunjukkan tingkat variasi atau penyebaran jawaban responden. Selanjutnya, nilai rata-rata diinterpretasikan berdasarkan interval skala Likert untuk menentukan kategori sangat tidak baik, tidak baik, cukup baik, baik, atau sangat baik. Dengan demikian, analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan publik telah diterapkan pada DPMPTSP Kota Bima berdasarkan persepsi aparatur yang menjadi responden penelitian. Hasil analisis ini juga menjadi gambaran awal

sebelum dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tata kelola keuangan publik.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Kategori
Transparansi (X1)	72	3,20	4,80	4,08	0,48	Baik
Akuntabilitas (X2)	72	3,30	4,90	4,15	0,45	Baik
Tata Kelola Keuangan Publik (Y)	72	3,25	4,85	4,11	0,46	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis deskriptif table 1, variabel transparansi (X1) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,08 dengan standar deviasi 0,48 dan termasuk kategori baik, yang menunjukkan bahwa ketersediaan, ketepatan waktu, kejelasan, aksesibilitas, dan keterpahaman informasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik. Variabel akuntabilitas (X2) memperoleh nilai rata-rata 4,15 dengan standar deviasi 0,45 dan berada pada kategori baik, yang mencerminkan bahwa kejelasan tugas dan tanggung jawab, kepatuhan, pelaporan, pengendalian internal, pertanggungjawaban, serta tindak lanjut pengawasan telah berjalan dengan baik. Sementara itu, variabel tata kelola keuangan publik (Y) memperoleh nilai rata-rata 4,11 dengan standar deviasi 0,46 dan termasuk kategori baik, yang menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pelaksanaan, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, pengawasan, pelaporan, dan pencapaian pelayanan telah dilaksanakan secara baik pada DPMPTSP Kota Bima.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap tata kelola keuangan publik (Y) pada DPMPTSP Kota Bima.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized B	Std. Error	Standardized Beta	t	Sig.
(Constant)	8,215	2,145	-	3,829	0,000
Transparansi (X1)	0,425	0,102	0,411	4,167	0,000
Akuntabilitas (X2)	0,468	0,108	0,427	4,333	0,000

Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan publik, dengan nilai ß = 0,411, t = 4,167, dan Sig. = 0,000 < 0,05. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan nilai ß = 0,427, t = 4,333, dan Sig. = 0,000 < 0,05. Dengan demikian, semakin baik transparansi dan akuntabilitas, semakin baik pula tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima.

Pengaruh Transparansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Publik Pada DPMPTSP Kota Bima

Hasil deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata transparansi sebesar 4,08 memperkuat bahwa praktik transparansi pada DPMPTSP Kota Bima telah berada pada kategori baik, sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa transparansi anggaran dan akuntabilitas berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta kinerja pemerintah daerah

(Fathirah et al., 2024; Sumual et al., 2021). Meskipun demikian, keterbukaan informasi perlu disertai dengan kualitas penyajian dan mekanisme partisipasi yang memadai karena publikasi informasi secara formal belum tentu menghasilkan akuntabilitas apabila informasi tersebut sulit dipahami atau tidak diikuti ruang pengawasan yang efektif (Davidyan & Waymire, 2025; Ferry et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima. Demikian menunjukkan semakin baik transparansi dalam pengelolaan keuangan, semakin baik pula tata kelola keuangan publik yang diterapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat pengawasan publik, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif *agency theory* (Davidyan & Waymire, 2025; Khairudin et al., 2022).

Keterbukaan informasi keuangan juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan kesediaan mereka memenuhi kewajiban publik (Krah & Mertens, 2023), sedangkan pelaporan keuangan yang berkualitas dapat mendukung pengambilan keputusan dan efektivitas pengendalian organisasi pemerintah (Dewi et al., 2019; Nogueira & Jorge, 2017). Dengan demikian, transparansi pada DPMPTSP Kota Bima tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif untuk memublikasikan dokumen anggaran, tetapi juga sebagai proses penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tata Kelola Keuangan Publik Pada DPMPTSP Kota Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata akuntabilitas sebesar 4,15. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aparatur DPMPTSP Kota Bima telah memiliki tingkat pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan publik. Tingginya nilai akuntabilitas menggambarkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan telah diarahkan pada prinsip pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban terhadap hasil penggunaan anggaran. Kondisi ini menjadi indikator penting karena akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana aparatur mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta tindakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan public. Temuan ini berarti bahwa peningkatan akuntabilitas akan diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola keuangan publik. Akuntabilitas tercermin melalui kejelasan tugas dan tanggung jawab, kepatuhan terhadap peraturan, pelaporan, pengendalian internal, pertanggungjawaban kinerja, serta tindak lanjut hasil pengawasan; aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak berhenti pada penggunaan anggaran, tetapi mencakup kewajiban menjelaskan proses, hasil, dan konsekuensi setiap keputusan keuangan (Khairudin et al., 2022). Dalam kerangka *new public management*, akuntabilitas diposisikan sebagai instrumen untuk mengarahkan organisasi publik agar berorientasi pada efisiensi, efektivitas, kinerja, dan kualitas informasi keuangan (Nogueira & Jorge, 2017; Otrusinová & Kulleova, 2019). Perubahan tersebut memperluas makna akuntabilitas dari sekadar kepatuhan administratif menjadi pertanggungjawaban berbasis kinerja dan pencapaian nilai manfaat bagi masyarakat (Iacuzzi, 2021; Pilcher, 2011).

Tingkat akuntabilitas yang baik juga menunjukkan adanya kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa sumber daya yang dikelola oleh pemerintah digunakan sesuai dengan

ketentuan, tujuan organisasi, serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, nilai rata-rata 4,15 dapat dipahami sebagai indikasi bahwa aspek pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan pada DPMPTSP Kota Bima telah berjalan relatif baik. Namun demikian, pencapaian tersebut tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem pengendalian, konsistensi pelaporan, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan kualitas pengelolaan keuangan [(Risya & Nurodin, 2017; Sumual et al., 202). Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Semakin baik mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan, semakin besar peluang organisasi pemerintah untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintahan. Pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan memberikan dasar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai bahwa sumber daya publik dikelola secara tepat dan berorientasi pada kepentingan pelayanan. Dalam hal ini, aparatur tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan kewajiban administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa setiap penggunaan anggaran memiliki dasar, tujuan, dan hasil yang dapat dijelaskan (Wonar et al., 2024).

Selain itu, pentingnya akuntabilitas semakin terlihat dalam kebutuhan untuk memperkuat pengendalian internal, pelaporan yang andal, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan dalam menjaga integritas penggunaan sumber daya publik (Dewi et al., 2019; Ferry & Ahrens, 2021). Pengendalian internal diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pelaporan yang andal memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan juga menjadi bagian penting karena menunjukkan adanya komitmen organisasi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam proses pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, capaian nilai rata-rata akuntabilitas sebesar 4,15 menunjukkan kondisi yang positif, tetapi capaian tersebut perlu dipandang sebagai dasar untuk melakukan penguatan secara berkelanjutan. Akuntabilitas yang baik perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang konsisten, pembagian tanggung jawab yang jelas, dokumentasi yang memadai, mekanisme pengawasan yang efektif, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pemeriksaan. Upaya tersebut penting agar akuntabilitas tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi berkembang menjadi budaya organisasi yang menempatkan pertanggungjawaban, integritas, dan penggunaan sumber daya publik secara tepat sebagai bagian dari praktik pemerintahan sehari-hari.

Pengaruh Simultan Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Tata Kelola Keuangan Publik Pada DPMPTSP Kota Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima. Hal ini dibuktikan melalui uji F yang menghasilkan nilai F sebesar 48,276 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tata kelola keuangan publik dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, semakin baik pula tata kelola keuangan publik yang diterapkan.

Temuan tersebut didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa transparansi memperoleh nilai rata-rata 4,08, akuntabilitas sebesar 4,15, dan tata kelola keuangan publik sebesar 4,11, yang seluruhnya berada pada kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Bima telah menerapkan keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab, pelaporan, pengawasan, serta pengelolaan keuangan secara relatif baik. Nilai rata-rata akuntabilitas yang paling tinggi menunjukkan bahwa aspek pertanggungjawaban aparatur menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung tata kelola keuangan publik.

Selanjutnya, nilai R Square sebesar 0,584 menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama mampu menjelaskan 58,4% variasi tata kelola keuangan publik, sedangkan 41,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat dan pihak berkepentingan memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan. Kombinasi keduanya dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, tertib, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bima.

Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik karena transparansi menyediakan akses terhadap informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut diikuti pertanggungjawaban dan tindakan korektif. Nilai *R Square* sebesar 0,584 menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mampu menjelaskan 58,4 persen variasi tata kelola keuangan publik, sedangkan 41,6 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kapasitas sumber daya manusia, kualitas sistem informasi keuangan, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, budaya organisasi, pengadaan barang dan jasa, serta efektivitas pengawasan. Pola hubungan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan yang saling melengkapi antarvariabel, sebab transparansi yang baik dapat memperkuat akuntabilitas, sementara akuntabilitas mendorong organisasi untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap dan dapat diverifikasi (Krah & Mertens, 2023; Zein & Septiani, 2025).

Temuan mengenai pengaruh simultan ini sejalan dengan penelitian lintas konteks yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, pelaporan keuangan, dan pengawasan sebagai unsur yang saling berhubungan dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan tercapainya nilai manfaat dari belanja pemerintah (Ferry & Murphy, 2017; Hrůza, 2023; Mukhamedyarova et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima tidak cukup dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi atau penambahan prosedur pertanggungjawaban secara terpisah, tetapi memerlukan integrasi antara penyajian informasi keuangan, pengendalian internal, evaluasi kinerja, audit, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam perspektif tata kelola publik, integrasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, kepatuhan, dan orientasi pelayanan karena keputusan keuangan menjadi lebih mudah ditelusuri, dinilai, dan dikoreksi. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, patuh terhadap ketentuan, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bima.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan publik pada DPMPTSP Kota Bima. Transparansi berperan dalam menyediakan informasi keuangan yang terbuka, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, sedangkan akuntabilitas memastikan adanya

kejelasan tanggung jawab, pelaporan, pengendalian internal, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, patuh terhadap peraturan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPMPTSP Kota Bima perlu meningkatkan kualitas dan keterbacaan informasi keuangan melalui pemanfaatan sistem informasi digital, memperkuat kompetensi aparatur pengelola keuangan, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara terukur dan terdokumentasi. Selain itu, disarankan untuk memperluas kajian mendalam jumlah pemohon layanan perizinan, pelaku usaha, serta masyarakat yang berinteraksi dengan DPMPTSP Kota Bima dan mempertimbangkan proyeksi peningkatan kunjungan, dan keterwakilan setiap kelompok pengguna layanan. Pengumpulan data secara berkala juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai persepsi transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan publik. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan lebih akurat, komprehensif, dan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. I., Sudirman, S., Masdar, R., Din, M., & Firman, M. F. (2022). Antecedents of the Accountability in Indonesian Local Government Financial Reporting. *International Journal of Professional Business Review*, *7*(5). https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e709

Abed, I. A., Hussin, N., Haddad, H., Almubaydeen, T. H., & Ali, M. A. (2022). Creative accounting determination and financial reporting quality: The integration of transparency and disclosure. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *8*(1), 38. https://doi.org/10.3390/joitmc8010038

Ahmad, A. Y. A. B., Abusaimeh, H., Rababah, A., Alqsass, M., Al-Olima, N., & Hamdan, M. (2024). Assessment of effects in advances of accounting technologies on quality financial reports in Jordanian public sector. *Uncertain Supply Chain Management*, *12*(1), 133–142. http://dx.doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.011

Alif, N., MULIATI, M., & Ashariana, A. (2025). Implementasi Kebijakan Electronic Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan*, *5*(1), 233–248. https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4279

Chakim, Moch. L., Nurcahyanto, H., & Tri Yuniningsih, Dra. (2024 *Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang*.

Davidyan, J. Y., & Waymire, T. R. (2025). Exploring Local Government Auditor Management Letter Practices: Linking Transparency and Accountability. *Financial Accountability and Management*, *41*(4), 720–737. https://doi.org/10.1111/faam.70002

Dewi, N. F., Azam, S. M. F., & Yusof, S. K. M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 1373–1384. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013

Eckardt, S. (2008). Political accountability, fiscal conditions and local government performance—cross-sectional evidence from Indonesia. *Public Administration and Development*, *28*(1), 1–17. https://doi.org/10.1002/pad.475

Fathirah, D., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Budget Transparency and Accountability in Local Government. *Asian Journal of Management Analytics*, *3*(4), 1171–1184. https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878

Fatoni, A. (2020). Fiscal Decentralization Dilemma in Indonesia: Between Corruption Accountability and Probability at Local Levels. *Jurnal Bina Praja*, *12*(1), 101–110. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.101-110

Ferry, L., & Ahrens, T. (2021). The future of the regulatory space in local government audit: A comparative study of the four countries of the United Kingdom. *Financial Accountability and Management*, *38*(3), 376–393. https://doi.org/10.1111/faam.12291

Ferry, L., & Murphy, P. (2017). What about Financial Sustainability of Local Government! A Critical Review of Accountability, Transparency, and Public Assurance Arrangements in England during Austerity. *International Journal of Public Administration*, *41*(8), 619–629. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1292285

Ferry, L., Fright, M., Midgley, H., Murphie, A., & Sandford, M. (2024). Are local government accounts trusted? Exploring the UK Levelling Up, Housing and Communities Committee verdict. *Durham Research Online (Durham University)*, 1–10. https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2423370

Hrůza, F. (2023). Analysis of the Financial Behaviour of Czech Municipalities as a Possibility for International Comparisons. *Prague Economic Papers*, *32*(4), 389–410. https://doi.org/10.18267/j.pep.837

Iacuzzi, S. (2021). An appraisal of financial indicators for local government: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*, *34*(6), 69–94. https://doi.org/10.1108/jpbafm-04-2021-0064

Karamoy, H., & Tawas, H. N. (2021). Revisiting the determinants of local government performance. *Accounting*, *7*(7), 1751–1756. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.4.022

Khairudin, K., Rahmawati, R., Winarna, J., & Gantyowati, E. (2022). The Indonesian provincial governments' post-reformation good governance quality: A PCA approach. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *25*(1), 59–88. https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.5168

Krah, R., & Mertens, G. (2023). Financial transparency, trust and willingness to pay in local governments of sub-Saharan Africa. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*, *35*(6), 100–120. https://doi.org/10.1108/jpbafm-06-2022-0110

Lewis, B. D. (2016). Local government spending and service delivery in Indonesia: the perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, *51*(11), 1695–1707. https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957

Mahruzal, M., Ritonga, T. Q. B., Aula, N., & Khaddafi, M. (2025). A Review of Accountability and Transparency in Regional Financial Management Literature in Public Sector Accounting. *Global Journal of Business Economics & Social Development*, *2*(2), 84–90. https://doi.org/10.56225/gjbesd.v2i2.53

Masdar, R., Furqan, A. C., Masruddin, M., & Meldawaty, L. (2021). The role of transparency and professional assistance in regional financial management in the Indonesian regional governments. *Journal of Public Affairs*, *21*(3). https://doi.org/10.1002/pa.2666

Masnila, N., Firmansyah, F., Febriantoko, J., Mayasari, R., & Said, J. (2022). Quality of financial reporting and impact of GGG implementation: Study on local government in Indonesia. *Proceedings of the 5th FIRST T3 2021 International Conference* (pp. 12–19). Atlantis Press. http://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.220202.003

Maulana, A. C. (2026). Financial Management of Regional Public Service Agencies: an Analysis of Flexibility, Accountability, and Performance in the Perspective of Public Governance. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, *5*(5), 336–342. https://doi.org/10.55324/ijoms.v5i5.1263

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Mukhamedyarova, L., Tussibayeva, G., Shakharova, A., Rudžionienė, K., Christauskas, Č., & Rakayeva, A. (2025). The Influence of Public Audit Bodies on the Effectiveness of Local Budget Governance. *Administrative Sciences*, *15*(12), 493. https://doi.org/10.3390/admsci15120493

Nogueira, S. P., & Jorge, S. (2017). The perceived usefulness of financial information for decision making in Portuguese municipalities. *Journal of Applied Accounting Research*, *18*(1), 116–136. https://doi.org/10.1108/jaar-05-2014-0052

Otrusinová, M., & Kulleova, A. (2019). Liquidity Values in Municipal Accounting in the Czech Republic. *Journal of Competitiveness*, *11*(1), 84–98. https://doi.org/10.7441/joc.2019.01.06

Padang, N. N., Padang, W. S., & Gultom, L. L. (2025). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 11*(1), 70–80. https://ejournal.ust.ac.id/JRAK/article/view/4705

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pilcher, R. (2011). Implementing IFRS in Local Government: Institutional Isomorphism as NPM Goes Mad? *Local Government Studies*, *37*(4), 367–389. https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588702

Poluakan, M., Kantohe, M., & Lontoh, M. (2024). Pengaruh akuntabilitas keuangan dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains, 4*(2), 67–76. https://doi.org/10.33197/bes.vol4.iss2.2024.2345

Risya, U., & Nurodin, I. (2017). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. http://eprints.ummi.ac.id/148/

Saleh, H., Rosad, I., Manda, D., Maulana, Z., & Idris, S. (2021). The effect of good governance on financial performance: An empirical study on the Siri culture. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8*(5), 795–806.

Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 6*(1).

Setiyawati, H., & Doktoralina, C. M. (2019). The importance of quality accounting information management in regional governments in Indonesia. *Management Science Letters*, 2083–2092. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.6.025

Sianturi, A. M., & Siahaan, M. (2024). Empirical Study on Compliance and Accountability in Government Finance. *International Journal of Economics Business and Management Research*, *8*(12), 211–225. https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.81217

Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management, 7*(1), 1735690.

Sofyani, H., Tahar, A., Ulum, I., Abdollahbeigi. (2022). The Role Of It Capabilities And It Governance On Accountability and Performance Of Higher Education Institutions During The Covid-19 Pandemic. *Management and Accounting Review*. https://doi.org/10.24191/mar.v21i02-07Sumual, F. M., Saerang, D. P. E.,

Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy, 40*(1), 106801.

Ulin, T. T., & Aisyah, S. (2023). Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Ktp-El Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Minfo Polgan*, *12*(2), 1946–1952. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13114

Wonar, K., Masdianah, M., Siahay, A. Z. D., Pangayow, B. J. C., Salle, H. T., & Bleskadit, N. H. (2024). The Effect of Transparency, Accountability, and The Concept of Value for Money on Public Sector Financial Management At The Regional Financial And Asset Management Agency (BPKD) Papua Province. *Journal of Economic Bussines and Accounting (COSTING)*, *7*(4), 7508–7516. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9868

Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2025). Improving Local Government Financial Performance: The Role of Management, Transparency, and Accountability. *Journal of Posthumanism*, *5*(6), 4858–4871. https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2698

Zubaidah, A., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *7*(3), 978–988. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475